

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pendidikan di negara berkembang dapat dikatakan Masih belum optimal dalam pelaksanaannya, terkhusus pada negara kita Indonesia masih tergolong dalam kategori rendah. Meningkatnya akses pendidikan, tetapi belum diikuti oleh peningkatan mutu. sebagaimana program-program unggulan pemerintah dalam akselerasi akses pendidikan berupa program 3T, Wajar, dll. Program tersebut seolah memaksa pendidikan secara fisik ada tetapi belum ada secara aktifitas pendidikan didalamnya. Dalam istilah yang dipopulerkan oleh Pritchett (2013), fenomena ini disebut sebagai “*schooling ain't learning*” ‘bersekolah tetapi tak belajar’. Bahkan Bank Dunia dalam laporan bertajuk *World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise* menyebutkan, terdapat empat faktor yang membuat peserta didik di banyak negara berkembang gagal belajar. *Pertama*, minimnya kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, baik karena kurangnya nutrisi sejak kanak-kanak, minimnya kondisi kesejahteraan keluarga, maupun kurangnya kemampuan literasi dasar. *Kedua*, kurangnya kompetensi dan motivasi guru dalam mengajar. *Ketiga*, minimnya sumber daya belajar. *Keempat*, manajemen dan tata kelola pendidikan belum berkembang baik (World Bank, 2018). Bahkan selain empat faktor tersebut, terdapat iklim dan budaya pembelajaran yang masih minim di berbagai sekolah, dan kesenjangan kualitas sekolah menjadi satu diantaranya.

Kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah masih menjadi isu penting dalam pemerataan mutu pendidikan, Indonesia memiliki 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan kondisi sosial ekonomi dan geografis serta kapasitas kelembagaan yang berbeda-beda sehingga memengaruhi kemampuan daerah dalam menerapkan kebijakan pendidikan. Pengalihan tanggung jawab melalui desentralisasi layanan pendidikan ke pemerintah daerah yang bervariasi ini memicu kekhawatiran politisasi dalam pengelolaan pendidikan. Kajian yang

dilakukan Rosser (2018) menunjukkan bahwa terjadi disparitas mutu pendidikan di Indonesia, selain muncul karena masalah pendanaan yang belum memadai, defisit sumber daya manusia antar daerah, struktur insentif yang keliru, dan manajemen pengelolaan yang belum memadai, terutama berkaitan dengan masalah ekonomi dan politik. Penyediaan dan pengelolaan sumber daya, serta rekrutmen dan pengelolaan guru misalnya, berhubungan erat dengan praktik politik dan kekuasaan di tingkat daerah (Rosser, 2018).

Berbagai upaya perluasan akses dan pembenahan mutu penyelenggaraan pendidikan belum membuahkan capaian pembelajaran yang memuaskan (Ree. et al., 2017). Survei capaian hasil belajar siswa seperti *Programme for International Student Assessment* (PISA) mengindikasikan mutu pendidikan di Indonesia belum beranjak baik. Hasil PISA dari tahun 2000 hingga 2018 menunjukkan performa yang cukup baik dalam hal perluasan akses pendidikan, terlihat dari meningkatnya partisipasi siswa bersekolah dalam survei PISA dari 39% pada tahun 2000 menjadi 85% pada 2018. Namun, perkembangan positif itu belum diikuti oleh capaian hasil belajar, di mana skor PISA 2018 untuk kemampuan membaca, matematika, dan sains secara berurutan adalah 371, 379, dan 376 yang mana berada di bawah rata-rata negara-negara OECD. Sebagian besar siswa bahkan tidak mampu mencapai kompetensi minimal di tiga bidang tersebut—sejumlah 70% siswa tidak mencapai kompetensi minimal dalam membaca, 71% untuk matematika, dan 60% untuk sains (Pusat Penilaian Pendidikan, 2019).

Berbagai kebijakan peningkatan mutu pendidikan nasional telah mampu mendorong terselenggaranya layanan pendidikan yang lebih berkualitas, tetapi belum mampu memberikan dampak lebih luas dan merata ke lebih banyak sekolah dan daerah. Keterbatasan dampak tersebut disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, intervensi yang dilakukan sering menyasar kepada sekolah-sekolah dengan mutu yang “sudah baik” sehingga, alih-alih mendorong pemerataan mutu pendidikan, justru dapat menambah disparitas mutu dengan sekolah-sekolah di sekitarnya. *Kedua*, program yang diberikan bersifat bantuan dana atau bantuan sarana fisik sehingga proses pengimbasan ke sekolah lain sulit dilakukan. *Ketiga*,

keberlanjutan program peningkatan mutu tidak didukung oleh ekosistem yang memadai baik di tingkat nasional maupun daerah. Regulasi yang menjamin keberlanjutan program di tingkat nasional tidak tersedia, begitu pula upaya adopsi dan perluasan program (*scale out*) di tingkat daerah tidak dilakukan.

Ekosistem pengembangan mutu dapat terbentuk apabila didukung oleh regulasi, kebijakan, dan penganggaran yang berkelanjutan, serta kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagai upaya melanjutkan dan mengembangkan kebijakan peningkatan mutu pendidikan agar lebih merata kepada lebih banyak sekolah dan daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginisiasi program sekolah penggerak. Program ini berupaya mendorong sekolah-sekolah melakukan transformasi diri untuk meningkatkan mutu pembelajaran di tingkat internal, kemudian melakukan pengimbasan ke sekolah-sekolah lain untuk melakukan peningkatan mutu serupa. Agar program ini berkelanjutan, maka perlu upaya untuk menciptakan ekosistem peningkatan mutu pendidikan baik di tingkat nasional, daerah dan satuan pendidikan. Regulasi, kebijakan, dan penganggaran bidang pendidikan akan difokuskan untuk mendukung peningkatan mutu agar capaian hasil belajar meningkat secara terus menerus baik di level satuan pendidikan, daerah, hingga nasional.

Sesuai Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai, sebagaimana dalam pasal 31 ayat 2 UUD 1945. Hak atas pendidikan tersebut tidak hanya berkenaan dengan akses terhadap pendidikan terutama pendidikan dasar, tetapi juga hak atas mutu pendidikan yang setara. Pasal 5 ayat 1 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Jaminan atas akses dan mutu pendidikan tersebut menjadi tujuan dari penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Sekolah penggerak merupakan sekolah yang mengedepankan pengembangan hasil belajar peserta didik, dimana didalam sekolah penggerak mengaitkan salah satu tema yakni profil pelajar pancasila (Javanisa. Et al, 2021). Program sekolah

penggerak merupakan penyempurnaan dari program transformasi sekolah yang ada sebelumnya. Dalam peluncuran program sekolah penggerak, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim menerangkan bahwa kolaborasi seluruh ekosistem pendidikan menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.

**DAFTAR 111 KAB/KOTA  
SASARAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK**

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
1	Prov. Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	56	Prov. Kalimantan Utara	Kab. Nunukan
2	Prov. Aceh	Kab. Bireuen	57	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat
3	Prov. Aceh	Kab. Nagan Raya	58	Prov. Kepulauan Riau	Kota Batam
4	Prov. Aceh	Kota Banda Aceh	59	Prov. Lampung	Kab. Lampung Tengah
5	Prov. Bali	Kab. Buleleng	60	Prov. Lampung	Kab. Pesisir Barat
6	Prov. Bali	Kota Denpasar	61	Prov. Lampung	Kota Metro
7	Prov. Banten	Kab. Pandeglang	62	Prov. Maluku	Kab. Maluku Tengah
8	Prov. Banten	Kota Tangerang	63	Prov. Maluku	Kota Ambon
9	Prov. Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	64	Prov. Maluku	Kota Tual
10	Prov. Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	65	Prov. Maluku Utara	Kab. Halmahera Tengah
11	Prov. D.I. Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	66	Prov. Maluku Utara	Kab. Halmahera Timur
12	Prov. D.K.I. Jakarta	Kota Jakarta Selatan	67	Prov. Maluku Utara	Kota Ternate
13	Prov. D.K.I. Jakarta	Kota Jakarta Timur	68	Prov. Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur
14	Prov. Gorontalo	Kota Gorontalo	69	Prov. Nusa Tenggara Barat	Kota Bima
15	Prov. Jambi	Kab. Kerinci	70	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Timur
16	Prov. Jambi	Kota Jambi	71	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote-Ndao
17	Prov. Jawa Barat	Kab. Bandung Barat	72	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Tengah
18	Prov. Jawa Barat	Kab. Bogor	73	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur
19	Prov. Jawa Barat	Kab. Cianjur	74	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang
20	Prov. Jawa Barat	Kab. Garut	75	Prov. Papua	Kab. Keerom
21	Prov. Jawa Barat	Kab. Karawang	76	Prov. Papua	Kab. Supiori
22	Prov. Jawa Barat	Kota Bandung	77	Prov. Papua	Kota Jayapura
23	Prov. Jawa Barat	Kota Bekasi	78	Prov. Papua Barat	Kab. Fak-Fak
24	Prov. Jawa Barat	Kota Sukabumi	79	Prov. Papua Barat	Kab. Manokwari
25	Prov. Jawa Tengah	Kab. Demak	80	Prov. Papua Barat	Kota Sorong
26	Prov. Jawa Tengah	Kab. Grobogan	81	Prov. Riau	Kab. Indragiri Hilir
27	Prov. Jawa Tengah	Kab. Kendal	82	Prov. Riau	Kab. Siak
28	Prov. Jawa Tengah	Kab. Klaten	83	Prov. Riau	Kota Dumai
29	Prov. Jawa Tengah	Kab. Semarang	84	Prov. Sulawesi Barat	Kab. Majene
30	Prov. Jawa Tengah	Kab. Sragen	85	Prov. Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang
31	Prov. Jawa Tengah	Kab. Temanggung	86	Prov. Sulawesi Selatan	Kab. Sidenreng Rappang
32	Prov. Jawa Tengah	Kota Pekalongan	87	Prov. Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng
33	Prov. Jawa Tengah	Kota Surakarta	88	Prov. Sulawesi Selatan	Kab. Takalar
34	Prov. Jawa Tengah	Kota Tegal	89	Prov. Sulawesi Selatan	Kota Makassar
35	Prov. Jawa Timur	Kab. Gresik	90	Prov. Sulawesi Tengah	Kab. Banggai
36	Prov. Jawa Timur	Kab. Lamajang	91	Prov. Sulawesi Tengah	Kab. Morowali
37	Prov. Jawa Timur	Kab. Nganjuk	92	Prov. Sulawesi Tengah	Kota Palu
38	Prov. Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	93	Prov. Sulawesi Tenggara	Kab. Baiton
39	Prov. Jawa Timur	Kab. Sumenep	94	Prov. Sulawesi Tenggara	Kab. Tatan Tengah
40	Prov. Jawa Timur	Kota Batu	95	Prov. Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Utara
41	Prov. Jawa Timur	Kota Kediri	96	Prov. Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Timur
42	Prov. Jawa Timur	Kota Probolinggo	97	Prov. Sulawesi Utara	Kota Bitung
43	Prov. Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	98	Prov. Sulawesi Utara	Kota Manado
44	Prov. Kalimantan Barat	Kab. Kuburaya	99	Prov. Sumatera Barat	Kab. Agam
45	Prov. Kalimantan Barat	Kab. Sintang	100	Prov. Sumatera Barat	Kab. Lima Puluh Koto
46	Prov. Kalimantan Barat	Kota Pontianak	101	Prov. Sumatera Barat	Kab. Tanah Datar
47	Prov. Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	102	Prov. Sumatera Barat	Kota Padang
48	Prov. Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru	103	Prov. Sumatera Selatan	Kab. Banyuasin
49	Prov. Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	104	Prov. Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ilir
50	Prov. Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	105	Prov. Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Timur
51	Prov. Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	106	Prov. Sumatera Utara	Kab. Asahan
52	Prov. Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas	107	Prov. Sumatera Utara	Kab. Batubara
53	Prov. Kalimantan Tengah	Kab. Murung Raya	108	Prov. Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang
54	Prov. Kalimantan Timur	Kab. Penajam Paser Utara	109	Prov. Sumatera Utara	Kab. Karo
55	Prov. Kalimantan Timur	Kota Samarinda	110	Prov. Sumatera Utara	Kab. Serdang Bedagai
			111	Prov. Sumatera Utara	Kota Medan

sd  ditspsdv  @ditspsd\_dikbud  Direktorat Sekolah Dasar

Gambar 1.1. Sasaran program sekolah penggerak

Program sekolah penggerak merupakan 1) program kolaborasi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah di mana komitmen Pemerintah daerah

menjadi kunci utama; 2) memerlukan intervensi yang dilakukan secara holistik, mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan pemerintah daerah; 3) program yang ruang lingkupnya mencakup seluruh kondisi sekolah, tidak hanya sekolah unggulan saja, baik negeri dan swasta. Selanjutnya, 4) pendampingan program dilakukan selama tiga tahun ajaran dan sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri; dan 5) program yang dilakukan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Sekolah Penggerak.

Sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1177/M/2020 tentang pedoman penyelenggaraan program sekolah penggerak, menyebutkan bahwa tujuan program sekolah penggerak adalah peningkatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar pancasila, menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas, membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas, serta menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, pemerintah daerah maupun pusat (Syafi', 2021). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Nadiem Makarim, sejak menerbitkan surat edaran nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan merdeka belajar dalam penentuan kelulusan peserta didik menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan, "Merdeka Belajar" atau "Kebebasan Belajar". Konsep "Kebebasan Belajar", yaitu membebaskan institusi pendidikan dan mendorong peserta didik untuk berinovasi dan mendorong pemikiran kreatif. Konsep ini kemudian diterima mengingat visi misi pendidikan Indonesia ke depan demi terciptanya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing diberbagai bidang kehidupan (Sibagariang. Et al, 2021).

Mendikbud mengatakan bahwa program ini akan mempercepat transformasi pendidikan di daerah. Menurutnya sangat penting adanya tempat untuk saling berkonsultasi merujuk pada kearifan lokal masing-masing daerah

sehingga sekolah lebih terinspirasi dalam melakukan perubahan. Sekolah penggerak bisa mementor sekolah di sekitarnya dan sekolah penggerak akan diberikan sumber daya pendukung, antar daerah akan saling belajar, karena semangat program ini bukan kompetisi melainkan kolaborasi. Keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajar yang efektif dalam rangka pendayagunaan SDM sekolah secara optimal.

Menindak lanjuti gagasan Mendikbud Bapak Nadiem Makarim, perubahan sekolah bisa dimulai dari sekolah-sekolah penggerak yang bisa menjadi contoh dalam kegiatan pembelajaran. Sekolah-sekolah penggerak diharapkan dapat menggerakkan sekolah-sekolah lain sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik. Reformasi pendidikan di Indonesia tidak bisa sukses tanpa ada perubahan di dalam sekolah. Sekolah penggerak bisa menjadi panutan, tempat pelatihan, dan juga inspirasi bagi guru-guru serta kepala sekolah lainnya. Program sekolah penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila. Visi pendidikan Indonesia di tahun 2035 adalah membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan pancasila (Kemdikbud, 2020).

Program sekolah penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru). Untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, tidak hanya dalam ilmu pengetahuan, dan teknologi namun juga memiliki karakter SDM yang kuat. Pemerintah merancang sebuah undang-undang tentang sistem pendidikan No 20 Tahun 2003, dalam UU tersebut pada Pasal 3, disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini juga mencakup semua jenjang pendidikan, termasuk di sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukannya peningkatan SDM sekolah melalui pelatihan dan pendampingan. Dalam pelatihan dan pendampingan penguatan sumber daya manusia (SDM) sekolah menggunakan platform belajar berupa *Learning Management System* (LMS), dan Program Sekolah Penggerak (PSP) serta didampingi atau difasilitasi oleh instruktur. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti akan menelusuri lebih mendalam mengenai program sekolah penggerak yang diluncurkan oleh kemendikbud demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian penelitian ini juga kiranya dapat memberi sumbangsi bagi sekolah-sekolah untuk menjalankan program sekolah penggerak tersebut.



Gambar 1.2. Tahapan Proses Transformasi Sekolah

Kepala sekolah merupakan elemen penting dalam membenahan tata kelola dan menjadi motor penggerak setiap satuan pendidikan sehingga akan tercipta lingkungan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan melalui

pembenahan sistem yang mendukung pada peningkatan kualitas pendidikan. Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mendefinisikan kepala sekolah sebagai guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin sekolahnya. Dengan demikian kepala sekolah adalah guru yang mampu mengintegrasikan profesionalismenya sebagai guru dan kompetensinya sebagai pemimpin manajerial sekolah untuk mewujudkan visi sekolah, yang berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa (Zamjani. Et al. 2020). Hal ini menunjukkan bahwa peranan kepala sekolah sebagai pemimpin menjadi indikator penting dalam terlaksananya pendidikan yang bermutu. Dalam konteks pendidikan, pendidikan yang bermutu mencakup; *input*, *proses* dan *output*. *Input* merupakan segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan dalam berlangsungnya suatu proses. Kemudian *proses* pendidikan adalah menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, mampu memotivasi dan memicu minat belajar dan mampu memberdayakan siswa. Sementara *output* pendidikan merupakan seberapa besar lulusan dari pendidikan tersebut dapat diterima atau dipakai oleh *stakeholders* (Harahap, 2016)

Peningkatan kapasitas kepala sekolah akan membantu warga sekolah untuk mengeksplorasi permasalahan yang dihadapi dan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan konsep transformasi bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan akan mampu menemukan solusi dan memperbaiki segala permasalahan secara mandiri. Kepala sekolah memiliki tiga peranan penting dalam menerapkan sekolah penggerak (Kemendikbud RI, 2021). Pertama, berkolaborasi dalam *community of practice* dengan kepala sekolah penggerak. *Community of practices* merupakan tools yang memfasilitasi *transfer of knowledge* agar terciptanya interaksi untuk saling belajar dan berkolaborasi dalam menambah nilai dan strategi pencapaian tujuan bisnis dan organisasi. Implementasi *community of practices* dapat memberikan wawasan dalam mengelola pengetahuan yang lebih dinamis dan berkelanjutan serta menciptakan organisasi yang inovatif dan kreatif (Venkatraman, 2018). Kedua, mendapatkan pelatihan manajemen. Pelatihan dan pengembangan manajemen bagi kepala



sekolah menjadi sebuah program untuk menilai dan meningkatkan kualitas pengajaran dan evaluasi kinerja guru, pengembangan kurikulum, sumber daya manusia, keuangan dan administrasi (Tan, 2018). Ketiga sebagai *instructional leadership*. Kepemimpinan instruksional merupakan sebuah sikap seorang kepala sekolah yang berkomitmen kepada guru dan siswa untuk meningkatkan kualitas dan kinerja guru dalam pembelajaran (Kazi, 2021). Kepemimpinan instruksional yang baik akan menciptakan iklim lingkungan sosial dan psikologis sekolah yang positif serta meningkatkan kinerja guru dan prestasi siswa (Dutta & Sahney, 2022). Dengan demikian, sekolah penggerak diharapkan dapat melakukan perubahan secara terus menerus dan bertransformasi menjadi sekolah yang mencetak profil pelajar pancasila (Zamjani. Et all 2020).

Tugas kepala sekolah sebagai pemimpin untuk ikut serta dalam program sekolah penggerak sebagai wujud tanggung jawab dalam peningkatan dan kemajuan pendidikan di sekolah. Sekolah penggerak ini merupakan kolaborasi Kemdikbud dan pemerintah daerah yang diikuti oleh PAUD, SD, SMP, SMA, SLB baik negeri maupun swasta. Beban kerja kepala sekolah meliputi melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan dan melakukan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan dalam upaya untuk meningkatkan mutu sekolah. Kepala sekolah dalam kepemimpinan lembaga pendidikan harus berupaya mengembangkan lingkungan belajar yang bersahabat, membuat perencanaan dan pelaksanaan program belajar yang efektif dan efisien, memperbaiki kualitas pengajaran yang kreatif, inovatif yang berbasis teknologi dan selalu melibatkan orang tua/wali siswa sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah (Rahayuningsih & Rijanto, 2022). Kepemimpinan kepala sekolah merupakan faktor penggerak organisasi dalam perubahan dan manajemen yang memberi dampak positif bagi perkembangan sekolah dalam mencapai tujuan dengan menggerakkan semua sumber daya yang dimiliki sekolah secara efektif dan efisien sehingga mampu merubah paradigma baru pembelajaran berorientasi pada siswa yang mewujudkan profil pelajar pancasila

yang mencakup kompetensi dan karakter yang berawal dari sumber daya manusia yang unggul untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Mariana, 2021).

Model kompetensi kepemimpinan sekolah dalam Peraturan Dirjend GTK nomor 6565/B/Gt/2020 ini merupakan sebuah upaya pemerintah untuk membawa perubahan paradigma kepemimpinan di sekolah, dari regulator menjadi pelayanan sehingga seorang kepala sekolah dapat membantu guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalitasnya serta berdampak positif terhadap cara belajar siswa sebagai *end user*. Pengelolaan kepemimpinan sekolah yang dikembangkan mengacu pada sejumlah strategi transformasi pendidikan yang mempertimbangkan dampak pada kualitas belajar murid, ringkas dan dapat diukur serta dapat dikembangkan berdasarkan bukti dan hasil riset, dan adaptif terhadap perkembangan zaman (Sudarmanto, 2021).

Setelah sekolah berhasil melakukan transformasi, sekolah penggerak akan menjadi agen perubahan bagi sekolah lain di sekitarnya. Sekolah penggerak akan menjadi inisiator dalam menjembatani sekolah-sekolah sekitar untuk berbagi solusi dan inovasi guna meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan pendekatan gotong royong/kolaborasi akan memungkinkan kepala sekolah dan guru untuk berbagi pengetahuan dan keahlian, serta mendorong terciptanya peluang-peluang peningkatan mutu, tidak hanya untuk sekolahnya sendiri, tetapi juga sekolah di sekitarnya. Selain itu, melalui sistem gotong royong pula, program sekolah penggerak juga diharapkan mampu menciptakan ekosistem perubahan, tidak hanya di sekolah, tetapi juga di level daerah dan nasional (Zamjani. Et all, 2020).

Sekolah penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru). Sekolah penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju. Sekolah penggerak dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak. Sekolah penggerak memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan sekolah-sekolah biasa, sekolah penggerak ini merupakan program

kolaborasi antara kemendikbud dengan pemerintah daerah dengan 5 intervensi yang terintegritas. Dan yang paling mendasar dari kurikulum sekolah merdeka memiliki perbedaan yang signifikan, apabila kita komparasikan dengan kurikulum sebelumnya yaitu biasa kita kenal dengan kurtilas, kurtilas dirancang berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan, sedangkan kurikulum merdeka menambahkan pengembangan profil pelajar pancasila. Jam pelajaran kurtilas diatur per minggu, sedangkan kurikulum merdeka diatur per tahun. Proses pembelajaran pada kurtilas dilakukan di kelas sedangkan kurikulum merdeka dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan serta kemampuan guru dan murid. Dan aspek penilaian kurtilas berdasarkan aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Sedangkan kurikulum merdeka mengutamakan penguatan profil pancasila, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Inilah yang menjadi Ciri khas dari kurikulum sekolah merdeka.

Selain pada itu untuk mengikuti program sekolah merdeka sekolah harus mengikuti seleksi yang ketat yang di adakan oleh kemendikbud, berbeda dengan program-program lain yang sikapnya berupa pengajuan, selain itu tidak semua guru dapat mengajar pada sekolah merdeka, karena para guru wajib mengikuti pelatihan terlebih dahulu dan mengikuti bimtek mengenai paradigma baru dalam sekolah penggerak. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk lebih memdalam mengenai sekolah penggerak, bagaimana kepala sekolah bisa mengatur dan memenejemen sekolah penggerak yang notabnya belum banyak sekolah yang terlibat dalam sekolah penggerak. Sebagaimana maksud dan cita-cita kebijakan sekolah penggerak, Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Almujaahidin merupakan sekolah yang lolos dalam seleksi mengikuti program sekolah penggerak dan menjadi salah satu sekolah swasta yang mengikuti program sekolah penggerak di Yogyakarta. SMP Muhammadiyah Almujaahidin telah melaksanakan program ini sejak Tahun 2021 ketika program ini diluncurkan pertama kali. Sebagaimana hasil evaluasi yang telah dilaksanakan SMP Muhammadiyah Almujaahidin telah menerapkan kurikulum sekolah penggerak

dengan tahap-tahap yang baik mulai dari melakukan asesmen terhadap peserta didik dalam rangka mengetahui kebutuhan, dan keinginan mendasar peserta didik, dan selanjutnya menggunakan hasil asesmen sebagai acuan guru dalam memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pada tahap awal ini guru-guru SMP Muhammadiyah Almujahidin telah mengimplementasikan kurikulum sekolah penggerak sebesar 70% dan 30%nya Masih dalam proses persiapan. Dalam jangka waktu yang terhitung cepat SMP Muhammadiyah almujahidin dapat merespon perubahan dengan baik, mulai dari penerapan kurikulum, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan supervisi. SMP Muhammadiyah almujahidin memiliki keunikan tersendiri dalam keunggulan program yang dimilikinya yaitu seperti program Roots (Pelatihan agent perubahan anti bullying) yang mana program tersebut selaras dengan tujuan transformasi sekolah yang di cita-citakan kemendikbud melalui program sekolah penggerak. Selain itu digitalisasi sekolah yang sudah melampaui dari apa yang dijadikan standar dari sekolah penggerak. SMP Almujahidin Sudah memiliki banyak product dalam digitalisasi sekolah diantaranya ialah ASA (aplikasi supervisi akademik), aplikasi LMS ruang belajar, aplikasi sistem management (Raport/laporan penilaian) Aplikasi GOBIT (penilaian golden habit), Aplikasi SKIU (sistem informasi keuangan ), aplikasi mujahidin library, aolikasi magz (majalah online), aplikasi mujahidin smart (penilaian online), aplikasi SIKAP (sistem informasi kehadiran akademik dan prestasi), dan website page sekolah. Selain kesuksesan dalam penerapan digitalisasi sekolah, sekolah pula sukses dalam menerapkan pembelajaran terdiferensiasi, yaitu pembelajaran dengan berpusat pada siswa dengan mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Dan selain itu sekolah memiliki program berbasis project dengan tujuan meningkatkan profil pelajar pancasila. Bertolak dari kenyataan dan persoalan yang ada, melihat perkembangan sekolah penggerak yang berorientasi pada peningkatan mutu dan kualitas sekolah maka diperlukan sebuah pengaturan atau manajemen sekolah yang baik, karena ketika cita-cita luhur tanpa pelaksanaan

baik itu mungkin hanya sebuah asa, akan tetapi cita-cita dan pelaksanaan yang terorganisir merupakan bentuk dari sebuah komitmen dalam menggapai cita-cita.

Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan program sekolah penggerak ini perlu adanya kegiatan manajemen sekolah yang baik dan sistematis sehingga tujuan pendidikan dan pendidikan sepanjang hayat akan tercapai, sebagaimana pengertian manajemen menurut Terry (1993). “Suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”. Dalam konteks penelitian yang penulis lakukan ini “Managemen Sekolah Penggerak dalam meningkatkan Kualitas Sekolah di SMP Muhammadiyah Almujahidin” sebagai tema, untuk mengetahui upaya manajemen yang dilakukan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan SMP Muhammadiyah Almujahidin. Dari penelitian ini pula diharapkan terciptanya sebuah sistem atau gambaran sistem yang dapat di kembangkan dalam memasifkan sekolah penggerak, sehingga sekolah-sekolah yang belum melaksanakan program ini dapat terinspirasi dan memasifkan program sekolah penggerak atau lebih jauh laginya dapat meningkatkan mutu yang berkualitas, sebagaimana tujuan dari program sekolah penggerak.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian membuat prototype manajemen sekolah penggerak di SMP Muhammadiyah Almujahidin

Adapun subfokus dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Perencanaan sekolah penggerak di SMP Muhammadiyah Almujahidin
2. Pengorganisasian sekolah penggerak di SMP Muhammadiyah Almujahidin
3. Pelaksanaan sekolah penggerak di SMP Muhammadiyah Almujahidin
4. Evaluasi sekolah penggerak di SMP Muhammadiyah Almujahidin

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Penyusunan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirangkai beberapa pertanyaan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perencanaan Sekolah Penggerak dalam Peningkatan Kualitas Sekolah di SMP Muhammadiyah Almujahidi?
2. Bagaimanakah Pengorganisasian Sekolah Penggerak dalam Peningkatan Kualitas Sekolah di SMP Muhammadiyah Almujahidin?
3. Bagaimanakah Pelaksanaan Sekolah Penggerak dalam Peningkatan Kualitas Sekolah di SMP Muhammadiyah Almujahidin?
4. Bagaimanakah Evaluasi Sekolah Penggerak dalam Peningkatan Kualitas Sekolah di SMP Muhammadiyah Almujahidin?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Membuat prototype manajemen sekolah penggerak. Dengan ruanglingkup:

1. Perencanaan sekolah penggerak di SMP Muhammadiyah Almujahidin
2. pengorganisasian sekolah penggerak di SMP Muhammadiyah Almujahidin
3. Pelaksanaan sekolah penggerak di SMP Muhammadiyah Almujahidin
4. Evaluasi sekolah penggerak di SMP Muhammadiyah Almujahidin

### 1.5 Manfaat Penelitian

Kajian penelitian yang dilakukan secara empirik diharapkan dapat memberikan solusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pendidikan di sekolah. Hal tersebut didukung dengan adanya penelaahan dan penelusuran data dan informasi yang berkaitan dengan Manajemen Sekolah Penggerak dalam Peningkatan Kualitas Sekolah di SMP Muhammadiyah Almujahidin sehingga hasil penelitian dapat bermanfaat bagi sekolah disekitarnya atau bahkan dapat menjadi pedoman manajemen sekolah penggerak pada tingkat nasional.

### **Manfaat Teoritis**

Pengkajian secara teoritis dan empiris dilakukan untuk memecahkan persoalan pendidikan di era digital ini yang berkaitan dengan kompetensi yang dibutuhkan pada abad 21 sehingga menyebabkan sekolah perlu melangsungkan transformasi untuk menyongsong perubahan zaman, maka penelitian yang dilaksanakan bertujuan untuk menganalisis dan menguraikan proses manajemen yang diterapkan dalam upaya peningkatan kualitas sekolah melalui program sekolah penggerak yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan begitu, kajian ini diharapkan dapat menghadirkan pengetahuan yang berguna agar dapat menyiapkan layanan pendidikan (sekolah) yang bermutu. Selain itu pula dapat menghasilkan perkembangan teori-teori kekinian yang dapat bermanfaat untuk di kemudian hari.

### **Manfaat Oprasional**

Serangkaian tahapan dan proses dalam manajemen sekolah penggerak dilakukan agar mampu yang dilakukan memberikan pemahaman mengenai situasi dan kondisi yang terjadi pada saat sekolah penggerak diterapkan sehingga membantu menghadirkan perbaikan mutu pendidikan yang lebih efektif dan efisien sesuai perkembangan era digital pada kebijakan merdeka belajar episode 6 yaitu menghadirkan sekolah penggerak di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, maka kegunaan utama penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat berbagai kepentingan, antara lain:

1. Dinas pendidikan: sebagai pengetahuan dan referensi yang relevan dalam melakukan upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di era digital dengan segala kompetensi abad-21 yang harus dimiliki oleh para pelaku pendidikan.
2. Sekolah: agar menjadi bahan masukan tentang keputusan dalam mengikuti program sekolah penggerak dengan berbagai kesiapan semua komponen sekolah (siswa, guru, kepala sekolah, dan semua warga sekolah, serta sarana pelatihan dan pembiasaan yang perlu dilaksanakan

agar dapat mewujudkan visi pendidikan Indonesia tahun 2045 yaitu menciptakan pelajar Pancasila.

3. Bagi masyarakat: diharapkan menambah sumber informasi pengetahuan yang bermanfaat agar dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung program peningkatan kualitas pendidikan dengan mengikuti sejumlah pelatihan menuju sekolah penggerak agar menghasilkan mutu sekolah yang optimal sesuai dengan kompetensi abad 21 saat ini.

### **1.6 State of the art**

Peneliti melakukan penelusuran studi literatur untuk menentukan state of the art pada permasalahan di atas, dengan data-data pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Rujukan literature jurnal yang digunakan

Year	Author	Judul	Nama Jurnal	Hasil Penelitian
------	--------	-------	-------------	------------------





2021	Tri Susanti	Manajemen Pembiayaan Sekolah Penggerak studi deskriptif kualitatif di SDN 08 Kabawetan	GUAU (Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam)	Manajemen pembiayaan/ Penyusunan program di SD Negeri 08 Kabawetan telah diawali dengan perencanaan, yang dibuat dan dilakukan oleh kepala sekolah dan dewan pengembang sekolah serta bendahara, dimana perencanaan pembiayaan pendidikan disesuaikan dengan panduan penyelenggaraan SD pengerak yang dikeluarkan oleh Dirjen, KA yang disusun oleh sekolah mencerminkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sekolah. pembiayaan sekolah adalah sumber dana yang diterima yang akan dipergunakan untuk penyelenggraan pendidikan sekolah
------	----------------	--	--	---



2022	Artha Mahindra Diputera	Konsep Evaluasi Pembelajaran Pada Sekolah Penggerak	Jurnal Sinar Edukasi	<p>Evaluasi merupakan hal penting dalam sebuah kegiatan apapun.</p> <p>Kurikulum sekolah penggerak sangat relevan dengan kondisi indonesia yang mrmiliki tujuan profil pelajar pancasila.</p> <p>Evaluasi pembelajaran pada sekolah penggerak disusun dengan prinsip dan alur yang Hanya memberikan penilaian terhadap siswa akan tetapi membantu guru dalam memperbaiki dan menyiapkan pembelajaran selanjutnya</p>
------	-------------------------	---	----------------------	--



2021	Fahrian Firdaus Syafi'i	Merdeka Belajar: Sekolah Penggerak	Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar peserta didik secara holistic dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta nonkognitif (karakter) yang diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru). Kemudian profil Pelajar Pancasila terdiri dari enam dimensi, yang diantaranya; 1) Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia, 2) Berkebinekaan Global, 3) Mandiri, 4) Bergotong royong, 5) Bernalar Kritis dan 6) Kreatif.
------	-------------------------------	---	--	--

2022	Sarlin Patilima	Sekolah Penggerak sebagai upaya peningkatan kualitas sekolah	Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta	<p>Program Sekolah penggerak mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, di mana sekolah penggerak merupakan program yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistic dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta nonkognitif (karakter) yang diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru). Kepala sekolah dan guru dari sekolah penggerak melakukan pengimbasan kepada satuan pendidikan lain</p>
------	-----------------	--	---	--

2021	Anggun Dwi Handayani , Zuraini Ritonga, dan Zulpan	Konsep Evaluasi Pembelajaran pada Sekolah Penggerak	Jurnal Sinar Edukasi	<p>Modul Kerangka Dasar Kurikulum terkait Sekolah Penggerak (2021) telah memaparkan semuanya secara jelas mengenai pembaharuan kurikulum yang dapat dilihat perbedaannya dengan kurikulum sebelumnya yaitu K-13. Di antaranya adalah pembelajaran dengan paradigma baru yang diorganisir untuk mencapai profil Pelajar Pancasila. Di awal telah dijelaskan bahwa asesmen merupakan bagian dari proses evaluasi. Dalam program Sekolah Penggerak yang bertujuan mencapai profil Pelajar Pancasila, aturan serta alur asesmen pun telah dirancang dengan prinsip-prinsip tertentu agar sesuai dengan tujuan.</p>
------	--	---	-------------------------	--

2021	Aulia Javanisa	Implementasi Kurikulum Sekolah Penggerak Terhadap Motivasi Peserta Didik	Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya	Berdasarkan penelitian bahwa Berdasarkan data yang sudah peneliti ambil dapat disimpulkan bahwasanya kurikulum sekolah penggerak mampu memotivasi peserta didik untuk meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran melalui proses diskusi . Sehingga implementasi kurikulum sekolah penggerak terhadap peserta didik dapat dikatakan meningkat.
------	----------------	--	--	--



2022	Adela Suesthi Rahayu Ningsih, dan Achmad Rijanto	Strategi Peningkatan Kualitas Sekolah Upaya Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Pembelajaran pada Program Sekolah Penggerak di Nganjuk	Jurnal Abdi Masyarakat	<p>Model kompetensi kepemimpinan sekolah merupakan representasi dari kepemimpinan pendidikan yang terintegrasi. Model kepemimpinan ini perlu ada di sekolah, karena sebagai dasar dari sistem pengelolaan sekolah dan sebagai acuan bagi sejumlah strategi transformasi pendidikan, Model kompetensi kepemimpinan sekolah terdiri dari empat kategori, yaitu kategori yaitu 1) pengembangan diri dan orang lain 2) kepemimpinan pembelajaran 3) kepemimpinan manajemen sekolah dan 4) kepemimpinan pengembangan sekolah. Model kompetensi kepemimpinan sekolah dikhususkan pada kategori kepemimpinan pembelajaran. Kategori</p>
------	--	---	------------------------	--

2021	Fahrian Firdaus Syafitri	Merdeka Belajar: Sekolah Penggerak	Prosiding Seminar pendidikan Dasar, Pascasarjana Unversitas Gorontalo	Merdeka belajar program sekolah penggerak merupakan proses trasformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistic.  Transformasi yang diharapkan tidak hanya sebatas pada satuan Pendidikan, tetapi juga untuk memicu terciptanya ekosistem pendukung perubahan  dan gotong royong di tingkat daerah dan nasional sehingga perubahan dapat menjadi secara luas dan terlembaga untuk menciptakan profil Pelajar Pacasila.
------	--------------------------------	---	---	---



2021	Sarlin Patilima	Sekolah Penggerak Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan	Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Gorontalo	<p>Peningkatan kapasitas kepala sekolah akan membantu warga sekolah untuk mengeksplorasi permasalahan yang dihadapi dan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan konsep transformasi bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan akan mampu menemukan solusi dan memperbaiki segala permasalahan secara mandiri. Sekolah Penggerak diharapkan dapat melakukan perubahan secara terus menerus dan bertransformasi menjadi sekolah yang mencetak Profil Pelajar Pancasila (Zamjani dkk, 2020: 38) Setelah sekolah berhasil melakukan transformasi, Sekolah Penggerak akan menjadi agen perubahan bagi sekolah lain di</p>
------	--------------------	---	---	--

2021	Anggarda Paramita Muji, Nurhizrah Gistituati, Alwen Bentri, dan Fris Okta Falma	<i>Evaluation of the implementation of the sekolah penggerak curriculum using the context, input, process and product evaluation model in high schools</i>	Jurnal Pendidikan Penelitian Indonesia	<i>This study reveals the evaluation of the implementation of the sekolah penggerak curriculum from the context aspect, namely the implementation of the sekolah penggerak curriculum that is in accordance with the needs of students, learning objectives, developments of the times, besides that it has also been seen that the understanding of teachers and school principals is related to the sekolah penggerak curriculum. Furthermore, teachers also have no difficulty in implementing the sekolah penggerak curriculum which has an impact on students' interest in learning for the better, besides that the sekolah penggerak curriculum has also been socialized to stakeholders. In the input</i>
------	--	--	---	---

2021	Dielfi Mariana	Pengaruh Kepemimpin an Kepala Sekolah Terhadap Efektivitas Sekolah Penggerak dalam Meningkatka n Kualitas Pendidikan	Jurnal Pendidikan Tambusai	Kepala sekolah penggerak mampu menggerakkan operasional sekolah serta menjadi fasilitator guru guru disekolah. Pembelajaran berpusat pada siswa dilakukan dengan pendekatan mikrolearning serta disesuaikan dengan kemampuan bakat dan minat siswa. Pembelajaran direncanakan sesuai kemampuan siswa dan kegiatannya beragam diharapkan dapat membuat siswa nyaman dan senang ketika belajar disekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin disekolah mampu menjadi lokomotif perubahan disekolah.
------	-------------------	---	----------------------------------	--

2022	Safuri Musa, Sri Nurhayat, Reny Jabar, Deddy Sulaimawa, Muhamma d Fauziddin	Upaya dan Tantangan Kepala Sekolah PAUD dalam Mengembang kan Lembaga dan Memotivasi Guru untuk Mengikuti Program Sekolah Penggerak	Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini	Beberapa upaya dapat dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepala sekolah paud dalam memupuk semangat pendidik untuk menjadi guru penggerak yang mementingkan kemajuan dan prestasi siswa paud dan sekolah. Salah satunya adalah melakukan rapat kerja bersama. Kegiatan rapat kerja tahunan, musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS), rapat dewan guru merupakan salah satu agenda yang bertujuan untuk komunikasi, menyusun rencana secara bersama dalam rangka merumuskan misi untuk mencapai tujuan bersama. Berbagi cerita, pengalaman dan prestasi di sekolah akan memberikan dorongan semangat dan kerjasama tim yang baik. Terjalinya
------	---	--	---	--

2021	Sudarmanto	<p>Pengaruh Komunikasi Kepala Sekolah terhadap Keterlaksanaan Kepemimpinan Sekolah pada Program Sekolah Penggerak</p>	<p>Jurnal Ilmiah Pro Guru</p>	<p>Kepala sekolah selain dari cerdas dalam melakukan komunikasi verbal tetapi juga supaya bisa menciptakan iklim komunikasi non verbal yang efektif sebagaimana yang telah diungkapkan Cangara (2005: 95 dalam Fatmawati, dkk., 2018: 202) yaitu, komunikasi non verbal merupakan komunikasi tindakan yang perlu dilakukan supaya kepala se– kolah dapat memberikan contoh kepada warga sekolah, bertindak sebelum bawahannya melaksanakan, tidak sekedar bicara tetapi bisa mewujudkan. Kepala sekolah dalam memeran– kan dirinya sebagai figur sentralinovator, motivator, dan mediator (Mulyasa, 2009: 98) pada sebuah programpengembangan sekolah yang telah</p>
------	------------	---	-------------------------------	--

Kehadiran penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya mengarahkan pada kebaruan dalam penelitian ini yaitu menguraikan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi yang perlu dilakukan untuk menjelaskan keefektifan program sekolah penggerak yang dilaksanakan. Adapun kebaruan dalam penelitian yang akan dilakukan menjadi urgensi untuk memberikan arahan serta masukan bagi peningkatan kualitas pelayanan pendidikan agar dapat mewujudkan visi pendidikan Indonesia tahun 2035. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam terhadap manajemen sekolah penggerak yang sedang banyak diikuti oleh para pelaku pendidikan dalam hal ini kepala sekolah, guru dan juga komponen yang tergabung dalam satuan pendidikan) demi menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pelajar Pancasila yang dibutuhkan.

